



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN SYAKIR WIDYASA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
3. NHK : 788061

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 75.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ 1,5 M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 171.978.420

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 82.585.541

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 929.563.961

III. HUTANG

Rp. 5.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 924.563.961

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.